

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, 1989, *Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya)*, Binacipta, Bandung
- Apeldoorn, L.J. Van, 1980, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (diterjemakan: Oestarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjan, 1990, *Radio Siaran, Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Fajar Nur Dewanta, Mukti, Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, FH UMY, Yogyakarta.
- Hatta, Mohammad, 1977, *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Mutiara, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Admintrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Radjawali Pers, Jakarta
- Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Grafika Pers, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Pertambangan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir, 1999, *Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, FH-UNPAD, Bandung.
- Mufid, Muhammad, 2005, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*, Kencana. Jakarta.
- Nazir, Moh., 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Pichler, Marie Helen, 1987, *Copy right Problems of Satellite and Cable Television in Europe*, Graham&Trotam, London.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Salindeho, John, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, Denny, 2003, *Alokasi Frekuensi dan Satelit di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Koperasi Pegawai Ditjen Postel Departemen Perhubungan, Jakarta.
- Soenandar, Taryana, 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekamto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soemitro, Rony Hamitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suheimi, 1995, *Kejahatan Komputer*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Stevenson, John, 1987, *Telecommunication*, Gramedia, Jakarta.
- Starke, J, 1992, *Introduction to International Law*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, Mohammad, 1954, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta.
- Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency pada Zona Layanan I dan Zona Layanan XIV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terrestrial.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 350 – 438 Mhz.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran.

C. Internet

Admin, “*Welles scares nation*”, <http://www.history.com/this-day-in-history/welles-scares-nation> diakses pada 11 Desember 2017 pukul 11.00 WIB

Admin, TVRO dan Stasiun Relay diakses di http://www.2wijaya.com/Relay_TV.htm pada tanggal 1 Maret 2018

Admin, Metode Penelitian “Jenis dan Metode Deskriptif”, <https://idtesis.com/metodedeskriptif/>, diakses pada 7 Desember 2016, pukul 09.13 WIB

Dwi Wulandari, *Pertarungan di Pasat TV Berbayar*, diakses dari <http://mix.co.id/headline/pertarungan-di-pasar-tv-berbayar> pada tanggal 2 Maret 2018

Eko Sutriyanto, “2.000 Operator TV Berlangganan Illegal Dibiarkan, Muncul Persaingan Tak Sehat”, *Tribun News*, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/19/2000-operator-tv-berlangganan-illegal-dibiarkan-muncul-persaingan-tak-sehat> diakses pada tanggal 24 Februari 2018 pada pukul 21.00

Pengertian Iklan Layanan Masyarakat diakses di <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-iklan-layanan-masyarakat.html> pada tanggal 1 Maret 2018

Pusat Pengetahuan Media Komunitas, *Apakah arti siaran itu?* Diakses dari <http://www.kombinasi.net/apakah-arti-siaran-itu/> pada tanggal 3 Maret 2018

Sarie, *Pembajakan Hak Siar, Indovision Mulai Libatkan Hukum*, diakses dari <https://techno.okezone.com/read/2010/10/25/54/386037/pembajakan-hak-siar-indovision-mulai-libatkan-hukum> pada tanggal 2 Maret 2018 pada tanggal 1 Maret 2018

Yoga Hastyadi Widiartanto, *KPI Ingin TV Berlangganan Utamakan Tayangan Lokal* diakses di <https://tekno.kompas.com/read/2015/02/13/18435417/KPI.Ingin.TV.Berlangganan.Utamakan.Tayangan.Lokal> pada tanggal 1 Maret 2018

D. Jurnal

Any Andjarwati, 2012, *“Sistem Hukum Spektrum Frekuensi untuk Kesejahteraan Rakyat”*, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dimiyati Hartono, 1993, *Beberapa Aspek Hukum Penggunaan Frekuensi Dalam Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Frekuensi Nasional: Pembinaan Frekuensi Radio untuk Menunjang Pembangunan di Jakarta,

Haryanto Widjaya, 1979, *Studi Tentang Interferensi Radio yang Disebabkan oleh Stasiun Konverter/Inverter TDAS*